

DAFTAR PUSTAKA

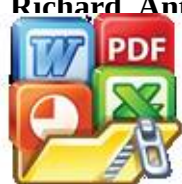
- Ade Amelia Manalu & Ivan Yudianto (2023).** *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Aset Kabupaten Bandung Barat. Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi, Volume 2, Nomor 1, 2023*
- Akhmad Ribut Pribadi, Karnadi, dan Lita Permata Sari (2023). Pengaruh Pengetahuan Akuntansi dan Teknologi Informasi terhadap Efektivitas pengelolaan barang milik daerah dengan Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso). *Jurnal Mahasiswa Entrepreneurship (JME), Volume 2, Nomor 10, Oktober 2023.*
- Amerieska, Siti, Fita Setiati, Imam Mulyono (2018). Analisis Faktor tentang Efektivitas Pengelolaan BMD (Studi Pada BPKAD Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia (JIBEKA). Volume 12, Nomor 2. Hal. 53-65.*
- Alter, S. (2002). *Information Systems: The Foundation of E-Business.* Prentice Hall.
- BPK RI. (2024). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2024 Atas Pengelolaan Aset Daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 27-1
- COSO (Committee of Sponsoring Organizations). (2013). *Internal Control — Integrated Framework.*
- Davis, F. D. (1993). User acceptance of information technology: system characteristics, user perceptions and behavioral impacts. In *International Journal of Man-Machine Studies*. Vol. 38, Issue 3, pp. 475–487
- Diniati Helman (2016). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Pengendalian Internal terhadap Efektivitas Pengelolaan BMN serta Dampaknya terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Program Magister Akuntansi, Universitas Padjadjaran*
- Dwi Sutra, Ilham Wahyudi, & Ratih Kusumastuti (2022).** *Analisis Efektivitas Sistem dan Prosedur Efektivitas pengelolaan barang milik daerah Sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 pada Pemerintah Kota Jambi. Jambi Accounting Review (JAR), Volume 2, Nomor 2, 2021.*
- Febi Ansari Mayang & Kamila K (2024).** *Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern pada Pengelolaan Barang Milik Negara di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara, Volume 5, Nomor 1, 2024*



riatmanto, B. (2020). Pengaruh Teknologi Informasi dan Kompetensi SDM pengelolaan Aset Tetap. *Jurnal Administrasi Publik*

(2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Bumi Aksara.

- Indrajit, R. E. (2005). *Manajemen Teknologi Informasi*. Andi Offset.
- Jogiyanto, H.M. (2005). *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Andi.
- Jogiyanto, H. M. (2005). *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Andi Offset
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2018). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (15th ed.). Pearson
- Listiani, L., & Agustin, H. (2022). Pengaruh Inventarisasi, Kompetensi Aparatur, dan Pengendalian Internal terhadap Optimalisasi Efektivitas pengelolaan barang milik daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(4), 861–882.
- Mahsun, M. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi Publisher.
- Manalu, A. A., & Yudianto, I. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Aset Kabupaten Bandung Barat. Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi, Vol. 2. No. 1 , Hal 55–73.**
- Mila Karmila (2021). *Implementasi Sistem Informasi Aplikasi Teknologi Siklus Barang Daerah Terhadap Kualitas Penatausahaan Barang Daerah di Kabupaten Garut. Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik, Volume 12, Nomor 2, 2021.*
- Mulyani, N., & Endri, E. (2021). Peran SPIP dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 9(1).
- Nurjanah, S., Putri, A.D., & Wulandari, R. (2022). Kompetensi SDM sebagai Variabel Moderasi pada Hubungan Sistem dan Kinerja Layanan Publik. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*.
- Nursafitri, R. E., & Andayani, S. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Pengamanan Aset Tetap Daerah. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi dan Akuntansi)*, Vol. 10. No. 2
- Orlikowski, W. J., & Iacono, C. S. (2001). Desperately Seeking the “IT” in IT Research. *Information Systems Research*, 12(2), 121–134.
- P. Bay & M. Tunti (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, Volume 7, Nomor 2, 2019**
- Richard Anthoni, Dwi Rachmina, & Trias Andati (2016). Strategi Penguatan Sistem ian Intern dalam Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bogor. najemen Pembangunan Daerah, Volume 8, Nomor 2, 2016**
- 2019). Kepatuhan terhadap Regulasi dan Implikasinya terhadap Pengelolaan ah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.



Rima Rachmawati, Dini Arwati, Shinta Dewi Herawati, dan Sendi Gusnandar Arnan (2018). Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dalam Penatausahaan Asset/ Barang Milik Daerah. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, Volume 10, Nomor 2, 2018

Sri Wahyuni, Isti Fadah, dan Diana Sulianti Tobing (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Efektivitas pengelolaan barang milik daerah. BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume 12, Nomor 1, 2018.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian*. Bandung : Alfabeta

Turban, E., Volonino, L., & Wood, G. (2015). *Information Technology for Management*. Wiley.

Undang-Undang dan Peraturan:

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.

BPKP (2016). *Peraturan Kepala BPKP No. 4 Tahun 2016 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP*.

Kementerian PAN-RB. (2008). *Permenpan No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi SPIP*.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020)

Republik Indonesia. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Efektivitas pengelolaan barang milik daerah

Republik Indonesia. Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Efektivitas pengelolaan barang milik daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Efektivitas pengelolaan barang milik daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021*. Jakarta: BPK RI.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Teknis Efektivitas pengelolaan barang milik daerah*. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

BPK RI. (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022*

